

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PKn MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PERGURUAN TINGGI

A. Pengantar

Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Namun demikian, ternyata dalam praksis politik pembangunan dan pendidikan keajegan perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa belum terjaga dengan baik, sehingga hasilnya belum optimal. Fenomena keseharian menunjukkan perilaku masyarakat belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai oleh Falsafah Pancasila.

Marilah kita tengok sejenak berbagai gejolak dalam masyarakat kita pada beberapa tahun terakhir ini, sangat memprihatinkan kita semua. **Pertama**, munculnya perilaku buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemaarah, suka mencaci, pendendam, perang antarkampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolahpun sudah dapat saling menyakiti dijalanan.

Kedua, dalam tiga dekade terakhir ini Indonesia tengah mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, aspek manusia dan budaya. Dalam aspek alam fisik Indonesia telah kehilangan tanah suburnya yang berganti menjadi lahan kritis dan diperkirakan bertam-bah tiap tahunnya. Dalam aspek alam hayati kita telah kehilangan hutan tropis dan Indonesia sekarang dikenal sebagai negara dengan laju *deforestasi* tertinggi di dunia, begitu juga dengan kekayaan alamnya banyak yang diambil secara ilegal oleh penjarah dari dalam maupun luar negeri. Dalam aspek manusia, Indonesia juga kehilangan daya saing, dalam aspek ketaatan hukum Indonesia juga sangat rendah. Dalam aspek budaya kita juga sudah kehilangan kecintaan terhadap kesenian tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa. Sebagian besar dari masyarakat kita juga sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu. Sudah sekian lamanya Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara paling korup. Celakanya lagi dengan *modus operandi* yang berubah-ubah hal itu dibudayakan. Kita kehilangan rasa ke-Indonesiaan kita. Tampaknya kita makin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kita kehilangan cita-cita bersama sebagai bangsa. Tiada lagi "*Indonesian Dream*" yang mengikat kita bersama, yang lebih menonjol adalah cita-cita kelompok, golongan mengalahkan kelompok, golongan lain.

Kondisi di atas menunjukkan Indonesia sudah kehilangan banyak hal dan kehilangan ini bukan tidak mungkin akan terus berlangsung. Jika demikian maka daftar kehilangan tentu akan semakin panjang. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah ini tanda-tanda kita akan meluncur ke arah kehilangan segala-galanya sebagaimana tersirat dalam kata-kata yang terdapat dalam sebuah lukisan karya A.D Pirus yang berjudul "*The Nightmare of Loosing*" :

You lose your wealth, you lose nothing

You lose your health, you lose something

You lose your character, you lose everything

Tentu saja kita tidak berharap seperti itu. Kita tidak menghendaki kehilangan karakter sebagai bangsa sehingga akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu berbagai upaya perlu diintensifkan untuk menjaga eksistensi kita sebagai bangsa yang berkarakter, berbudaya dan berkeadaban tinggi.

B. Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka peme-rintah telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan penumbuhkembangkan karakter positif bangsa. Untuk itu maka pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup mengem-bangkan potensi yang berasal dari fitrah insani, dari Allah SWT. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini.

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembang-kan kembali karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun. Sehingga apabila karakter ini dapat kita bangun kembali, kita perkuat, maka Insya Allah, kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan masa depan.

Ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

C. Penguatan PKn dan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi.

Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007). Jika memperhatikan uraian tersebut, maka tampak bahwa PKn merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa.

Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKn perlu diperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para mahasiswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

Salah satu model adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan karakter adalah melalui *Project Citizen Bhinneka Tunggal Ika*. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang memberikan bekal menuju “*to be a good citizens*” (terbentuknya warga negara yang baik). Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai pengetahuan, nilai dan sikap, serta ketrampilan mahasiswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengacu pada SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006 pada pasal 3 tentang kompetensi dasar ayat 2b, menyebutkan tentang kompetensi mahasiswa dengan menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah: “Menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis dan berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.”

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multi-kultural diarahkan sebagai upaya pengembangan warganegara multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan. Pada konteks ini, kompetensi kewarga-negaraan multikultural yang dimaksud dapat didasarkan pada empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan (1998), yaitu *the personal, social, spatial, dan temporal dimension* untuk selanjutnya dirumuskan dalam tiga komponen kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Branson (1998), yaitu *civic knowledge, civic skill, and civic disposition*.

Kewarganegaraan multidimensi terdiri atas empat dimensi pokok yaitu: (1) dimensi pribadi (*personal*), (2) dimensi sosial, (3) dimensi spasial, dan (4) dimensi temporal. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warganegara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus meningkatkan: (a) kapasitas untuk berpikir secara kritis dan sistematis; (b) pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah perbedaan-perbedaan budaya; (c) pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan (d) keinginan untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. *Civic Skills* (kecakapan kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual dan kecapakan berpartisipasi. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Mengutip pendapat Branson (1998) maka konstruk karakteristik warga negara dimaksud adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan ke dalam tiga komponen penting, yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional Branson (1998:16).

Sebagai realisasinya, salah satu alternatif pelaksanaan kebijakan yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan praksis pendidikan melalui model pembelajaran PKn Multikultural berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah dan sebagai pusat praksis pendidikan (*educentrum*) manusia seutuhnya. Pendidikan karakter warga negara multi-kultural yang berbasis kearifan lokal merupakan praksis pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif, bebas dan bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi dirinya sehingga menjadi pribadi berakhlak mulia, menjadi manusia seutuhnya dalam totalitasnya sebagai manusia. Pendidikan karakter melalui PKn Multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah keniscayaan bagi transformasi moralitas bangsa agar mampu keluar dari belitan sumber krisis multidimensi yaitu krisis nilai.

PKn multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan di dunia persekolahan (perguruan tinggi) yang didasarkan pada teori bahwa PKn merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam rangka pembentukan karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokratis, dan membentuk mosaik yang indah (*cultural pluralism: mozaik analogy*) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Ricardo L. Garcia, 1982: 37-42).

Sebagai sebuah model pembelajaran, pengembangan PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di sekolah/PT dengan pendekatan inkuiri sosial memiliki karakter menghargai potensi, kreativitas dan keragaman individual-kultural siswa. Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (*plurality*) dan keanekaragaman (*heterogeneity*). PKn multikultural menjadi sebuah keniscayaan bagi wahana desimnansi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural, yang secara sinergis terkait erat dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

D. PKn dan Pengembangan Masyarakat Multikultural Berbasis Kearifan Lokal

Pengembangan masyarakat multikultural yang demokratis menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas), karena multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dalam sebuah masyarakat. Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi dan wadahnya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan di sini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan, 1998:116).

Menurut Winataputra (2008: 30), Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku,

yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan pada setiap jamannya itu.

Lebih lanjut menurut Winataputra (2008:31) pendidikan kewarga-negaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks yang demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural.

Namun demikian kenyataan praksis di lapangan Pendidikan Kewarga-negaraan di perguruan tinggi yang merupakan ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan penghargaan akan keragaman justru belum menggembirakan, mulai kehilangan dimensi multikulturalnya, bahkan kehilangan aktualisasinya karena terjebak pada penguasaan pengetahuan (*knowledge*) belaka dengan membiarkan aspek afeksi (*attitude*) pendidikannya. Pembelajaran PKn umumnya dilakukan secara parsial dan tidak mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal masyarakat setempat. Padahal seharusnya PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dapat mengembangkannya secara lebih sistematis dan komprehensif.

Sementara itu, kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Haba, (2007: 330) mengatakan bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi Haba (2007: 334-335) setidaknya ada enam signifikansi serta fungsi kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, *local wisdom* akan mengubah pola pikir, dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground/kebudayaan* yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Keenam fungsi kearifan lokal yang diuraikan di atas, menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai atau kearifan lokal (*local wisdom*), dimana sumber-sumber budaya menjadi penanda identitas bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok maupun aliran kepercayaan. Konflik multikultural yang menyertainya pun juga akan mampu dikelola secara arif dan tidak selalu melibatkan politik kekuasaan sebagaimana yang selama ini dipraktikkan melalui hubungan agama dan negara di Indonesia. Menurut Abdullah (2003: 8) dalam konteks ini perlu adanya transformasi ruang dari pendekatan “dari luar” (global) ke pendekatan “dari dalam” (lokal) dimana dinamika konflik antara agama dan kepercayaan serupa, dengan menyandar-kan pada nilai-nilai lokal (*local values*).

Motto Bhineka Tunggal Ika sebenarnya mengakomodasi atas keragaman dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ironisnya keragaman dalam kesatuan budaya bangsa dalam perjalanan kemerdekaan negara dan bangsa lebih ditekankan pada aspek kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama penggunaan bahasa daerah mengalami kemunduran maupun kehilangan daya gunanya secara pragmatik (Wiriatmadja, 2002: 221).

Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan primordial seperti stereotipe, etnosentrisme dan sebagainya, memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Tetapi konsep primordialisme itu sendiri memerlukan kajian yang lebih proporsional. Adanya ikatan “lokal-tradisional”, sering dirasakan sebagai suatu realitas sosial-kultural itu diperlukan sebagai pengisi identitas diri dan kelompoknya yang terasa hampa, memerlukan keakraban karena lebih bersifat naturalistik dan bukan rekayasa. Apalagi akibat proses globalisasi, kita sering terasa “sepi” dan memerlukan ikatan komunitas lama yang akrab (Abdullah, 1999: 19).

Setiap komunitas (etnis, agama, daerah) pasti memiliki nilai-nilai luhur tertentu yang dipandang baik serta dijadikan aturan dan norma sosial. Nilai-nilai ini selanjutnya mengikat masyarakat dalam sebuah komunitas dan menjamin mereka untuk hidup dengan damai, harmonis, bersahabat, saling menghargai dan menghormati, saling membantu satu sama lain. Kenyataan ini mesti disadari sebagai salah satu kekuatan alamiah yang tumbuh dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Karenanya, kekuatan ini sangat baik dan penting

untuk diperkuat kembali posisinya dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam hubungan sosial, di samping penegakan hukum positif dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Mengingat begitu penting dan strategisnya nilai kearifan lokal dalam pembangunan bangsa, maka sangat wajar apabila dalam penelitian ini pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural difokuskan pada penggalian nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.

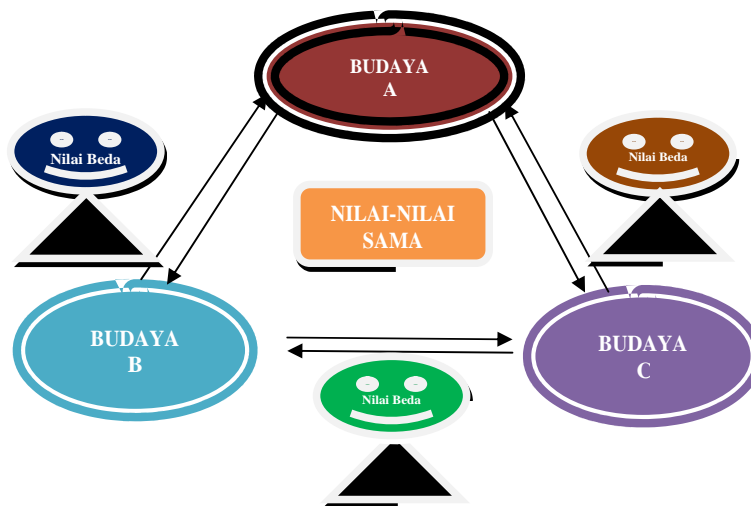
Dilihat dari segi Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi, tantangan tersebut belum dapat dijawab dengan kurikulum yang ada. Modus dan isi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di perguruan tinggi selama ini menunjukkan fenomena yang kurang menghargai dan mengeksplorasi nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal yang merupakan essensi kultur demokrasi di ruang-ruang kuliah dan di masyarakat secara sinergis. Modus Pendidikan Kewarganegaraan selama ini kecendrungannya hanya terjadi di kelas, sedangkan di masyarakat cenderung bertentangan atau bersifat paradoks. Isi Pendidikan Kewarganegaraan juga hanya bersifat hafalan saja, kurang mengeksplor aspek afektif dan psiko-motorik mahasiswa. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter bangsa isinya bukan untuk dihapalkan tetapi untuk dipahami dan dilaksanakan. Berangkat dari kondisi di atas, dirasa sangat urgen dan perlu pengembangan watak kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal melalui pengkajian dan pengorganisasian kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*civic competency, civic skill and civic participation*).

Beberapa nilai kearifan lokal masyarakat Malang (Jawa Timur) yang dapat dikembangkan dalam PKn multikultural berbasis kearifan lokal, antara lain:

- 1) "seng gedhe ora keno gumedhe, seng cilek ora keno mitek" (yang besar tidak boleh sombong, yang kecil tidak boleh seperti ayam, 2) "Sayuk rukun saiyeg saeka praya" (manunggal rukun bersama-sama satu tujuan), 3) "Sing guyub rukun" (bersatu dan rukun), 4) "Gotong royong" (kerja bersama, kebersamaan untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan, 5) "Ana catur mungkur" (menghindari silat lidah, biar dingin dulu), 6) "Aja adigang-adigung adiguna" (jangan menyombongkan kekayaan, kekuatan dan kekuasaan), 7) "Aja dumeh, tepa sliro, ngerti kuwalat" (jangan merasa hebat, tenggang rasa dan tahu karma), 8) "Wong urip nggur sawang sinawang" (orang hidup hanya saling memandang satu sama lain), 9) "Negara mawa tata, desa mawa cara" (negara punya aturan, desa punya cara), 10) "Tata tentrem karta raharja" (tertata tenteram, makmur dan aman), 11) "Rumangsa melu handarbeni, rumangsa wajib hangurungkebi, mulat sarira hangrasa wani" (merasa ikut memiliki, merasa wajib membela, melihat badan dan mawas diri), 12) "Empan papan" (sesuai waktu dan tempat), 13) "Salam satu jiwa Arema" (salam Arema untuk merasa satu jiwa).

Nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran PKn dapat digali dan dieksplorasi lebih dalam lagi, tergantung pada kemampuan mahasiswa untuk menangkap fenomena yang ada di masyarakat sekitarnya. Di samping itu mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengeks-presikan bentuk budaya dan kearifan lokal lain, misalnya: festival keagamaan, ceritera-ceritera rakyat, relasi sosial (kekerabatan) yang dipercaya berasal dari leluhur yang sama, seni tari, nyanyian, makanan bersama (kuliner) dan sebagainya.

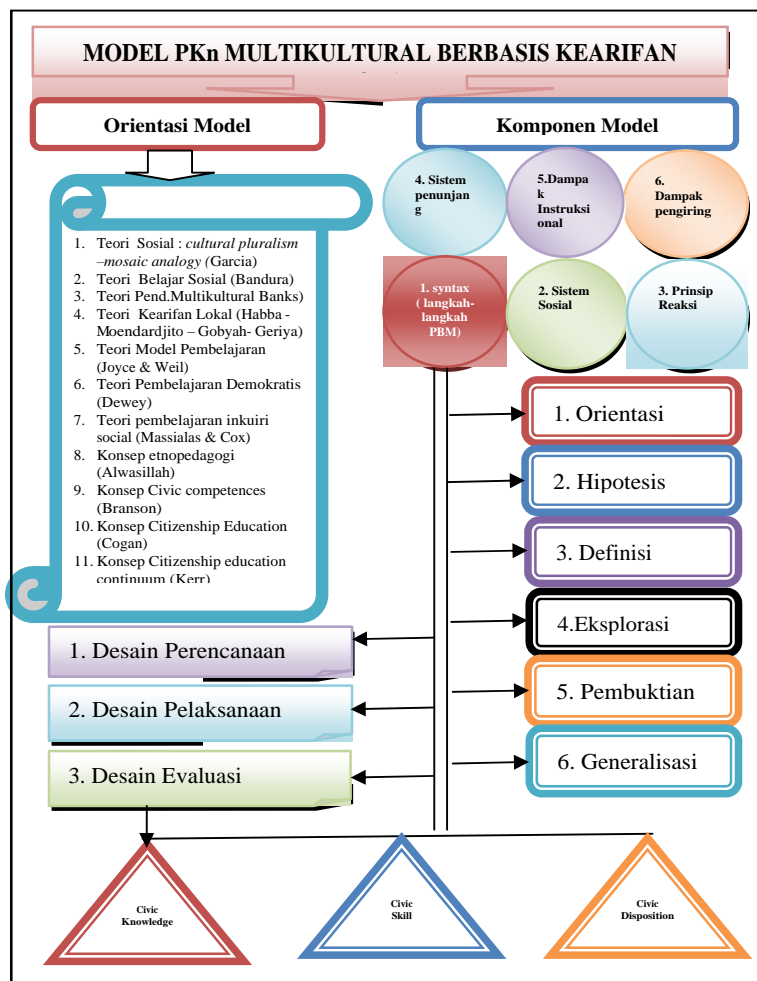
Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut apabila digambarkan dalam bagan pembuktian hipotesis tampak sebagai berikut.



Bagan 1. Format pembuktian hipotesis dan analisis data tugas kelompok mahasiswa dalam pengembangan model PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Perguruan Tinggi

Pada bagan 1 di atas, nilai-nilai yang sama dianggap sebagai kekuatan integrasi bangsa sedangkan nilai – nilai yang beda sebagai kekayaan budaya yang perlu dihargai dan dilestarikan keberadaannya. Penerapannya dalam penyusunan desain pelaksanaan model unsur nilai-nilai kearifan lokal menjadi sesuatu yang menarik bagi mahasiswa untuk diresapi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diminta mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakatnya lalu bagaimana pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal tersebut di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena hal itu dapat menjadi sebuah resep manjur untuk mengobati kerinduan terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam kevakuman budaya global yang begitu deras mendera dunia saat ini. Dengan kata lain model PKn MBKL merupakan sebuah solusi untuk menjembatani tarik-menarik antara nilai etnisitas dan globalisasi.

Desain evaluasi perkuliahan dilakukan pada saat proses maupun hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi kewarganegaraan multikultural mahasiswa sekaligus pemahaman atas materi yang diberikan yang dilakukan melalui test tertulis dalam bentuk essay yang dilakukan dengan pre tes maupun post tes, yang dilengkapi dengan produk hasil karya mahasiswa berupa CD pembelajaran dan BINDERR (Buku inkuiri nilai-dialogis - edukatif-rekreatif dan reflektif). Masing-masing kelompok diberi umpan balik berupa catatan evaluasi revisi tugas “Project Citizen Bhinneka Tunggal Ika”. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui cocok tidaknya nilai-nilai kearifan lokal dan multikultural dengan aspek kekinian. Uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan tampak sebagaimana bagan 2 berikut.



Bagan 2 Desain Konseptual Pengembangan model PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Perguruan Tinggi

E. Penutup

Dari pembahasan di atas mengenai penguatan pendidikan karakter melalui PKn multikultural berbasis kearifan lokal dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai, moral dan karakter Pancasila.

2. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang berjumlah 18 butir di buku panduan Puskur dapat diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran/ matakuliah yang ada di sekolah/ perguruan tinggi.
3. PKn multikultural berbasis kearifan lokal menjadi sebuah keniscayaan bagi wahana desimnasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural, yang secara sinergis terkait erat dengan penguatan pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia ke depan.

Oleh karena itu bagi pendidikan di Indonesia PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak, budaya dan karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa PKn merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *confluent education*. Pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yang berwatak dan bermartabat ke Indonesiaan.

DAFTAR BACAAN

Abdullah, Taufik. 1999. *Nasionalisme dan Sejarah*, Bandung: Satya Historika

Abdullah, H.M. Amin. 2003. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

Cogan, J.J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.

Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.

Garcia, R.L. 1982. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.

Habba, John. 2007. *Analisis SWOT Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik* dalam Ammirachman, Alpha. *Revitalisasi Kearifan Lokal Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP.

Winataputra, U.S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.

Winataputra. U.S. 2008. *Multikulturalisme – Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pemba-ngunan Karakter Bangsa Indonesia Dalam Dialog Multikultural*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

Winataputra dan Budimansyah 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

Wiriaatmadja, Rochiati 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*, Bandung: Historia Utama Press.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURUL ZURIAH, lahir di Trenggalek, 12 Juli 1966 dari pasangan suami–istri Bapak H. Sukidi Al Sochib (alm) dan Ibu Hj. Siti Roesmini, merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Pada saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap kopertis Wilayah VII DPK di Jurusan Civic Hukum/PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang – 65144 Telp. 0341 – 464318 Ext. 119. Fax. 0341-460782, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dalam bidang Pendi-dikan Kewarganegaraan dan Metodologi Penelitian. Kepangkatan dan golongan Pembina Utama Muda IV C. Alamat rumah di Perumahan Bumi Asri Sengkaling Blok G-17-18 Malang, KodePos 65151, Telp.0341-463468;HP.08123382195;E-mail:zuriahnurulzuriyah@yahoo.com. Ia mempunyai seorang suami: Drs. H. Hari Sunaryo, M.Si (Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia – FKIP UMM) dengan dua orang anak tercinta, yaitu: Razqyan Mas Bimatyugra Jati (Mahasiswa

Arsitektur UB) dan Raehani Ajeng Prabaswaratna Nindyasti (Siswa SMAN 3 Malang).

Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, diawali dengan bersekolah di SDN 1 Nglongsor, Kecamatan Tugu – Trenggalek, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Trenggalek, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 di Kota Trenggalek, dan lulus pada tahun 1985. Selepas SMU ia diterima melalui jalur PMDK sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Pendidikan Moral Pancasila & Kewarganegaraan (PMP & KN) dan lulus pada tahun 1990. Setelah lulus, melalui jalur Tunjangan Ikatan Dinas ia diterima sebagai dosen tetap Kopertis VII DPK di Jurusan Civic Hukum/PPKn – FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. S-2 bidang sosiologi diselesaikannya pada tahun 1996, dan Lulus Doktor Pendidikan Kewarga-negaraan pada SPs-UPI Bandung pada bulan Juli 2011 yang lalu.

Pengalaman akademik dan profesional dimulai sebagai dosen di Jurusan PPKn–FKIP UMM, mulai tahun 1990-sekarang. Sekretaris Tim Penyelia Mengajar Dosen UMM (1999- 2000) ; Ketua Jurusan Civic Hukum/PPKn – FKIP UMM (2000-2001); Ketua Jurusan Civic Hukum/PPKn – FKIP UMM (2001-2003); Ketua Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK) UMM (2003-2004) ; Kepala Klinik Pendidikan- FKIP Universitas Muhammadiyah Malang (2005-2007); Kepala SD Muhammadiyah IX Malang (2007) dan Staf Khusus Humas & protokoler UMM (2007 – 2008). Di samping itu ia sebagai Instruktur dan Fasilitator serta Tim Pengembang *Civic Education* di perguruan tinggi dan sekolah Muhammadiyah mulai tahun 2001 – 2007; Instruktur PLPG; Peneliti di Universitas Muhammadiyah Malang mulai tahun 1998 – sekarang; Tim Penilai Buku Non Teks Pusat Perbukuan-BSNP Depdiknas, tahun 2009-2011.

Di samping itu ia juga sebagai penulis buku yang cukup produktif dan pernah mendapatkan 2 kali hibah penulisan buku teks dari DP2M – DIKTI Depdiknas pada tahun 2000 dengan judul “Action Reasearch Teori dan Aplikasinya dalam bidang Pendidikan dan Sosial dan tahun 2001 dengan Judul “Revitalisasi Filsafat dan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi”. Mendapat penghargaan Penghargaan Karya Tulis Ilmiah Pembangunan Peranan Wanita Tahun 1998 dengan Judul : Revitalisasi Eksistensi Wanita Sebagai Pilar Bangsa dalam Era Reformasi Pembangunan Indonesia”. Surat Pendaftaran Hak Cipta dengan Judul Ciptaan: “Buku-CD Panduan Pembelajaran Demokratis Berpers-pektif Gender” dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Tahun 2007. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2008. Penghargaan Peneliti Penyaji Terbaik dalam Seminar Hasil Multi Tahun Anggaran 2008. Sertifikat Pendidik – Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional tahun 2008.

Penyaji/Moderator/Peserta dalam berbagai kegiatan seminar dan konferensi nasional dan internasional, seperti : *3rd International Education Conference UPSI-UPI Acheiving Excellence and Quality In Teacher Education* di Malaysia, Tahun 2008. Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Kompetensi Kewarganegaraan di Era Global Melalui Pendidikan Kewarga-negaraan: Problem dan Prospek, di FPIPS – UPI Bandung. FGD - Dialog Multikultural Untuk membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Prodi Pasca-sarjana PKn – UPI Bandung, Tahun 2009. Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Kebangsaan Menuju Visi Indonesia 2025 Tahun 2009. Lokakarya dan Diskusi Nasional Pendidikan Wawasan Kebangsaan Memasuki Reformasi Gelombang II di Isola Resort – UPI Bandung, Tahun 2009. Seminar dan Lokakarya Bangkit bersama Membangun Negeri: Membangun Kebersamaan, Integrasi dan Harmoni, memasuki Reformasi Gelombang ke II, di JICA – UPI Bandung, Tahun 2009. Seminar Nasional Pendidikan Kewargane-garaan Menjawab Tantangan Globalisasi di Gedung JICA- UPI Bandung Tahun 2008. Simposium Nasional Penelitian Pendidikan Tahun 2008 & 2009 di Hotel Millinium – Jakarta, Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2010-2011 dan masih banyak lagi yang lainnya.

Karya ilmiah yang pernah ditulis dan diterbitkan antara lain berupa buku teks yang berjudul : (1) “Action Research Teori dan Aplikasinya dalam bidang Pendidikan dan Sosial – Bayu Media & UMM Press (2005); (2) Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori – Aplikasi) – Bumi Aksara (2006); (3) Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan (Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti yang Kontekstual dan Futuristik Versi Ke-Indonesiaan)- Bumi Aksara (2007); (4) Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berpespektif Gender Teori dan Aplikasinya di Sekolah - UMM Press (2008); (5) Berpikir Kritis – Dialogis Melalui DDCT (*Deep Dialogue and Critical Thinking*) Teori dan Aplikasinya dalam Pembelajaran - UMM Press (2009). PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal: Teori dan Aplikasinya dalam Pembela-jaran (Proses terbit 2011).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.